



Biaya HUT Amlapura Terancam Bermasalah

Dewan khawatir audit hasil pemeriksaan dana perayaan HUT Amlapura 2015, nantinya jadi temuan BPK. Sebab perayaan dilakukan mendadak termasuk penentuan anggaran yang mencapai ratusan juta.

AMLAPURA, NusaBali

Perayaan hari ulang tahun (HUT) Kota Amlapura yang digelar mendadak dengan puncaknya pada 22 Juni mendatang dikhawatirkan bermasalah. Kalangan, DPRD Karangasem memperkirakan pengeluaran biaya hingga ratusan juta itu bisa menuai masalah belakangan karena berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, pihak eksekutif optimis segala biaya yang keluar itu tidak akan memicu masalah dan bisa lolos dari pemeriksaan BPK.

Untuk diketahui, HUT ke-375 Amlapura yang baru disepakati eksekutif dan pansus I DPRD Ka-

rangasem yang dipimpin I Gusti Agung Dwi Putra pada Jumat 16 April lalu. Sedangkan APBD 2015, telah disahkan sebelumnya.

Itu berarti anggaran mendahului, dari acara yang hendak disepakati.

Anggota DPRD I Kadek Sujanayasa yang juga Plt Ketua Partai Nasdem Karangasem, memperkirakan audit hasil pemeriksaan dana perayaan HUT Amlapura 2015, nantinya menuai masalah. "Kan, lucu jadinya, sebelum ditetapkan hari jadi kota Amlapura, anggaran telah disahkan. Bisa saja, nantinya jadi temuan BPK," kata Sujanayasa, di Amlapura, Selasa (1/7).

Anggota dewan lainnya, I Made Juita juga berpendapat seperti itu. "Memang lucu HUT Amlapura kali ini, setelah anggaran perayaan ditetapkan, barulah eksekutif menyetorkan ranperda HUT Amlapura," jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Karangasem I Made Wirta juga menyoroti dan mengatakan pelaksanaan HUT terkesan mendadak. Walau sebelum ranperda HUT dibahas, telah lebih dahulu mengajukan anggaran perayaan.

"Memang penetapan HUT Amlapura itu kesannya mendadak, atas kesepakatan tokoh Puri Batuaya, Puri Karangasem, DPRD dan eksekutif. Tetapi biaya perayaannya mendahului, hari jadi ditetapkan. Nantinya kan BPK yang menilai apa boleh seperti itu," jelas Wirta, politisi dari PDIP Karangasem.

Kabag Keuangan Setdakab

Karangasem I Dewa Ari Menaka mengakui, anggaran perayaan HUT Amlapura mendahului penetapan HUT itu sendiri. "Saya rasa tidak masalah, begitu ranperda HUT Amlapura diajukan, di APBD 2015 telah tersedia anggaran," kata Ari Menaka.

Dia menambahkan, optimis tidak akan jadi temuan BPK, karena seluruh anggaran yang terpasang dipergunakan untuk kegiatan. "Kan ada pos biaya, untuk perayaan hari-hari besar daerah. Lebih lanjut tanyakan saja kepada Kabag Tata Pemerintahan," jelas Ari Menaka.

Bahkan Kabag Tata Pemerintahan Setdakab Karangasem I Ketut Artha Sedana juga optimis, tidak jadi masalah, mengenai penggunaan biaya perayaan HUT Amlapura tersebut. "Memang sebelum HUT Amlapura disahkan jadi perda, mendahului menyediakan anggaran di APBD 2015. Tetapi judul pos anggaran itu, tidak termuat secara detail menyangkut HUT Amlapura, tetapi untuk hari-hari besar daerah," katanya.

Artha Sedana optimis, penggunaan biaya itu, tidak jadi temuan BPK. Hanya saja tidak mengetahui secara rinci biaya yang keluar. Alasannya, biaya perayaan tersebut terpecah di beberapa SKPD. "Khusus di Bagian Tata Pemerintahan, hanya menyediakan anggaran Rp 186 juta, lebih banyak di Disperindag yang mengoordinasikan peserta pameran, di Dinas Budpar untuk hiburan berikut hadiah-hadiah yang keluar dan sebagainya," tambahnya. **k16**

Edisi : Kamis, 2 Juli 2015

Hal : 8



Desa Pakraman dan Subak Digelontor Bantuan Rp 58,4 Miliar

★ Dinas Perketat Pengawasan Penggunaan Dana

SINGARAJA, NusaBali

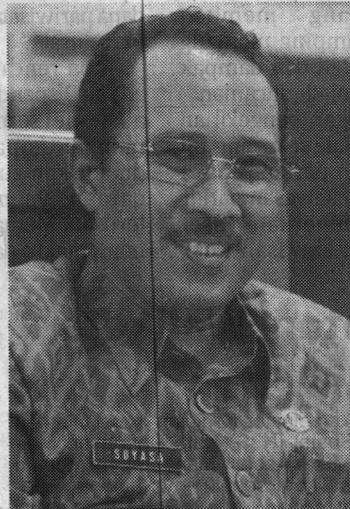
Pemerintah Provinsi Bali tahun ini kembali menggelontorkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang direalisasikan kepada Desa Pakraman, subak dan subak abian. Di Buleleng sendiri saat ini ada ratusan calon penerima bantuan yang sudah terdaftar dan siap untuk mengelola bantuan tersebut. Aliran dana BKK disebut akan digunakan untuk kegiatan pelestarian budaya.

"Tahun ini desa pakraman, subak dan subak abian yang masih beroperasi di Buleleng kembali mendapatkan dana BKK dari Provinsi Bali, dengan jumlah total mencapai Rp 58,45 miliar," ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Buleleng, Gede Suyasa, Rabu (1/7).

Ia mengatakan bahwa jumlah dana tersebut akan dibagi rata kepada 169 desa pakraman yang ada di Buleleng yang masing-masing akan mendapatkan dana sebesar Rp 200 juta. Sedangkan untuk 300 subak dan 193 subak abian yang ada di Buleleng, masing-masing akan mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 50 juta.

Dari sejumlah dana yang diterima oleh masing-masing Desa Pakraman, subak dan subak abian, dikatakan akan digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang bersifat pelestarian budaya. Selain juga pembangunan di Parahyangan, Pawongan dan Palemahan dan operasional. Pembiayaan upacara seperti ngusaba, nakluk merana dan kegiatan lainnya yang telah tercantum dalam aturan.

Namun dalam pengelolaan dana yang terbilang cukup besar menurut Suyasa, menjadi poin penting untuk mensosialisasikan bimbingan teknis dan penggunaan dana bantuan yang tepat dan benar, kepada masing-masing



• NUSABALI/LILIK
Kadisbudpar Gede Suyasa.

kelian desa pakraman dan kelian subak yang ada.

Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyimpangan penggunaan dana bantuan yang sewaktu-waktu dapat diaudit. Suayasa pun mengatakan, masing-masing calon penerima bantuan juga diharapkan melakukan perencanaan yang ketat, untuk memaksimalkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Selain juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tetap akan melakukan pendampingan, terkait, penyusunan perencanaan yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Pihaknya juga akan melakukan pengawasan penggunaan dana BKK tersebut, melalui tim khusus yang dibentuk.

"Untuk penggunaan dana tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang ada, kami tetap akan melakukan pendampingan dalam penyusunan perencanaan, dan juga pengawasan penggunaan dana melalui tim khusus," kata dia. ☎ k23

Edisi : Kamis, 2 Juli 2015

Hal : 4



Eks Bupati dan Jaksa Sama-sama Ajukan Banding

DENPASAR, NusaBali

Mantan Bupati Klungkung Wayan Candra resmi mengajukan upaya banding atas putusan Pengadilan Tipikor Denpasar, yang jatuhkan vonis 12 tahun penjara plus membayar uang pengganti kerugian negara Rp 1,2 miliar terkait kasus korupsi, gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Nota banding sudah diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Senin (30/6) lalu.

"Kami resmi banding. Nota banding sudah kami ajukan secara resmi ke PN

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

Eks Bupati dan Jaksa Sama-sama Ajukan Banding

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Denpasar hari Senin," ungkap tim kuasa hukum mantan Bupati Candra yang diwakili Wayan Warsa T Bhuana di Denpasar, Rabu (1/7).

Menurut Warsa T Bhuana, ada beberapa alasan kenapa kliennya ajukan banding atas putusan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (23/6) lalu. Di antaranya, hukuman 12 tahun penjara dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang 15 tahun penjara, dirasa sangat berat.

Selain itu, kata Warsa, terkait perampasan 59 item aset milik Candra yang sebelumnya disita pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung. Penyitaan aset ini dirasa sangat berlebihan. Warsa memaparkan, jika

dihitung, aset Candra yang dirampas kejaksaan itu melebihi Rp 42 miliar.

Menurut Warsa, dari aset-aset yang dirampas kejaksaan tersebut, banyak yang dihasilkan Candra sebelum menjabat Bupati Klungkung tahun 2003, saat kliennya ini masih menjadi pengacara. Namun, hasil fee sebagai pengacara tersebut baru dicairkan setelah Candra menjabat Bupati Klungkung.

"Banyak aset klien kami yang dihasilkan saat dia menjadi pengacara, jauh sebelum menjabat Bupati Klungkung. Ini juga sudah kami buktikan di sidang pengadilan," tegas advokat senior asal Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli ini.

Bukan hanya Candra selaku terpidana yang mengajukan banding atas

putusan Pengadilan Tipikor Denpasar. Pihak kejaksaan juga ajukan banding. Menurut Kasi Pidsus Kejari Klungkung, Made Pasek, pihaknya sudah menempuh jalur banding, Jumat (27/6) lalu. "Kami sudah nyatakan banding sejak Jumat lalu ke PN Denpasar," tegas Made Pasek secara terpisah, Rabu kemarin.

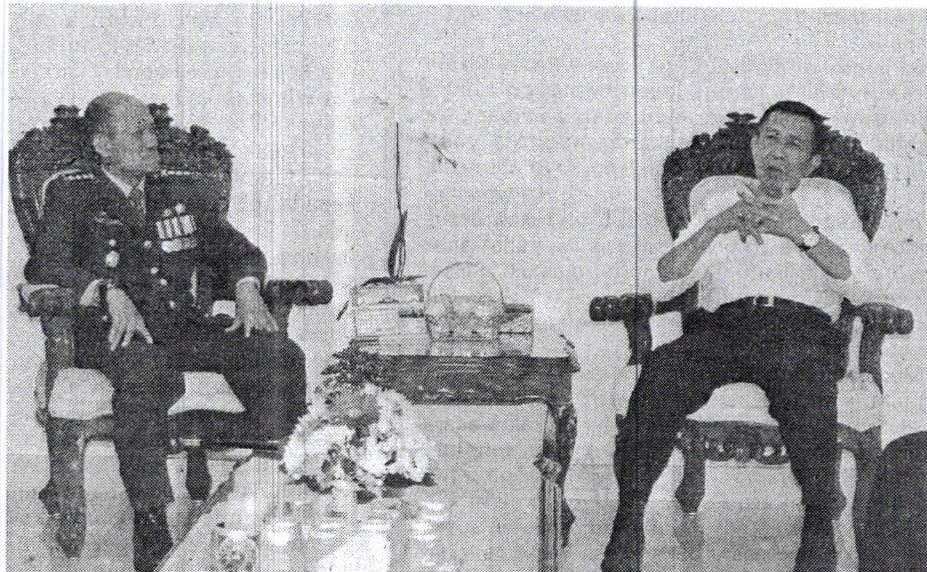
Made Pasek menyebutkan, ada beberapa pertimbangan terkait banding yang diajukannya, antara lain, pasal korupsi yang dijatuhkan. Selain itu, dari tuntutan perampasan 60 item aset milik Candra, hanya 59 item yang dikabulkan hakim. "Yang terakhir, pertimbangan ganti rugi, yaitu tuntutan Rp 42 miliar, tapi hanya dikabulkan Rp 1,2 miliar lebih," tandas Made Pasek. rez

Edisi : Kamis, 2 Juli 2015

Hal : 1 dan 15



Gubernur Pastika Rangkul TNI untuk Percepat Bedah Rumah



• IST
GUBERNUR Made Mangku Pastika menerima Danrem 163 Wirasatya Arhanud Nurchahyanto, di ruang kerja gubernur, Rabu (1/7).

GUBERNUR Bali Made Mangku Pastika meminta dukungan TNI untuk menyukseskan pelaksanaan Program Bedah Rumah. Hal tersebut disampaikan Pastika saat menerima Danrem 163/Wirasatya Arhanud Nurchahyanto di ruang kerjanya, Rabu (1/7).

Bedah rumah, jelas Pastika, merupakan salah satu prioritas dalam program Bali Mandara. Dilaksanakan mulai tahun 2009, Pemprov Bali telah berhasil merenovasi 10 ribu rumah tak layak huni. Pada anggaran induk tahun 2015, pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30 miliar untuk membiayai 1.000 unit bedah rumah. Selanjutnya pada anggaran perubahan, pihaknya akan mengusulkan tambahan 550 unit bedah rumah untuk mendapat persetujuan DPRD Bali.

Program ini, tambah Pastika, dikerjakan dengan pola swakelola. Karena itu, dia sangat mengharapkan jajaran TNI AD dapat menyisihkan waktu untuk membantu masyarakat mengerjakan bedah rumah. "Iya, mungkin ada satu dua orang petugas Babinsa yang membantu kami di setiap unit bedah rumah," pintanya.

Selain bedah rumah, Pastika juga memperkenalkan program Bali Mandara lainnya

seperti JKBM dan beasiswa pendidikan. Bahkan, Gubernur Pastika bicara banyak tentang perkembangan SMAN Bali Mandara, sekolah unggulan rintisan Pemprov Bali yang sukses mencetak lulusan berkualitas. "Sekali waktu bapak bisa mengunjungi sekolah itu," ajaknya.

Selain pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan, bidang keamanan juga menjadi perhatian dalam program Bali Mandara. Karena itu, Pastika berkomitmen untuk mendukung aparat keamanan baik TNI atau Polri dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Pemprov telah memberikan bantuan kendaraan operasional guna mendukung tugas aparat di lapangan.

Danrem Nurchahyanto antusias mendengar penjelasan Pastika. Pihaknya siap bekerja sama untuk menyukseskan program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu, dia minta data yang lebih detail mengenai bedah rumah yang tengah dikerjakan. Nurchahyanto yang baru beberapa pekan menjabat sebagai Danrem 163 Wirasatya berharap, sinergi yang telah terbangun selama ini dapat terus dimantapkan. Pertemuan juga dihadiri Karo Humas I Dewa Gede Mahendra Putra SH.MH serta perwakilan dari Badan Kesbangpol Linmas dan Satpol PP Provinsi Bali. @

Edisi : Kamis, 2 Juli 2015

Hal : 3



Jaringan Irigasi Sawan Ribuan Haktare Diperbaiki

GIANYAR, NusaBali

Puluhan subak dengan ribuan hektare di Gianyar akan menerima perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi 2015. Proyek dengan dana Rp 30.723.127.000, bersumber dari dana APBD Gianyar, APBD Bali, dan APBN, untuk peningkatan sektor pertanian di Gianyar.

Demikian ditegaskan Kelapa Dinas Pekerjaan Umum Gianyar Ida Bagus Sudewa di Bagian Protokol dan Humas Setda Gianyar, Rabu (1/7). Terkait proyek tersebut, pihaknya memperlakukan kepada para petani dan masyarakat di lintasan irigasi itu akan mengalami gangguan air irigasi. "Kami mohon khusus para petani agar siap-siap mengatur pola tanam karena pasti ada gangguan air irigasi ini," jelasnya.

Gus Sudewa menjelaskan, proyek tersebut di antaranya dari APBD Gianyar 2015 Rp 819.847.000 untuk kegiatan optimalisasi pemeliharaan rutin dan berkala. Kegiatan ini pada 68 jaringan irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten. Selain itu, rehabilitasi 25 jaringan irigasi dengan nilai Rp. 4.817.266.000 sehingga total alokasi APBD Gianyar Rp 5.637.113.000. Sedangkan APBD Provinsi Bali Rp 4.446.828.000 untuk peningkatan jaringan irigasi Dwi Eka Bhuana, Banjar Pusuan,

Desa Buahana Kaja, Kecamatan Payangan yang lintas Kabupaten Bangli - Gianyar.

Selain itu, kegiatan didanai APBN Rp 20.639.186.000 dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Bali - Penida. Kegiatan ini meliputi empat kegiatan yakni peningkatan jaringan irigasi DAS (Daerah Aliran Sungai) Tukad Ayung Rp 5.269.186.000. Lanjut, peningkatan jaringan irigasi DAS Tukad Oos Rp 5.574.973.000 dengan 10 daerah irigasi di Klutug, Ubud, Bualu, Lebah, Ulan, Kasur Sari, Babakan, Payangan, Bangkiang Sidem, Soca, dan Bon Jaka. Peningkatan Jaringan Irigasi Das Petanu dengan pagu dana Rp 5.574.973.000 dengan sasaran kegiatan daerah Irigasi Manuaba dan Gunung Sari. Selain itu, Peningkatan Jaringan Irigasi DAS Tukad Pakerisan dengan pagu Rp 4.219.582.000. Proyek ini dengan sasaran peningkatan 12 daerah irigasi di Lawas, Mancingan, Basang Ambu, ManikTawang, Ban Batu, Tegal Banua, Buron Alit, Cutak, Sulangai, Delod Siangan, dan Desa Pejeng.

Gus Sudewa menambahkan, proyek yang segera digarap ini melalui pengusulan intensif mulai dari pihak subak dan Pemkab Gianyar ke Provinsi Bali dan Pusat. **Isa**

Edisi : Kamis, 2 Juli 2015
Hal : 6



Korupsi BBM Bersubsidi Jembrana Terdakwa dan Kadis Berniat Lobi Kapolres

Upaya menghentikan kasus dugaan penyelewengan BBM bersubsidi sempat diupayakan menghubungi pihak Kapolres Jembrana.

DENPASAR, NusaBali

Keterangan mengejutkan dilontarkan Kasi Industri Menengah Disperindagkop Jembrana, Ketut Parwiadi dalam sidang kasus dugaan korupsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan terdakwa Made Sueca Antara yang merupakan anggota DPRD Jembrana. Parwiadi mengaku bersama Kadisperindagkop Jembrana, Ni Made Ayu Ardini dan terdakwa, sempat berencana melakukan lobi ke Kapolres Jembrana untuk menghentikan kasus ini.

Hal ini terungkap saat Parwiadi bersaksi untuk terdakwa Sueca Antara dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar pada Selasa (30/6). Sueca yang menjabat sebagai Kasi Industri Menengah mengaku sempat membantu mem-

buat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi untuk usaha milik terdakwa, UD Sumber Maju. "Waktu itu pembuatan rekomendasi pertama sekitar bulan Desember 2012," jelasnya.

Lalu setelah rekomendasi ini menjadi masalah dan ditangani oleh Polres Jembrana sekitar bulan November 2013, Sueca mengaku sempat dipanggil oleh Kadisperindag, Ardini yang sedang diperiksa penyidik. Saat itu, Sueca disuruh membuat hasil verifikasi usaha milik terdakwa. Beberapa pekan kemudian, Sueca diajak Ardini bertemu dengan terdakwa yang saat itu bersama pengacaranya di salah satu restoran di Jembrana.

Pertemuan ini membahas jalan keluar kasus rekomendasi BBM yang dikeluarkan Disperindagkop kepada usaha milik terdakwa. Saat itu, Parwiadi sempat diminta Kadis Ardini untuk mengurangi jumlah BBM yang diberikan untuk terdakwa. Selain itu, juga dibahas lobi ke Kapolres Jembrana untuk menghentikan kasus ini. "Waktu itu Bu Kadis yang bilang ke Pak Made (Sueca, red) supaya bisa lobi ke Kapolres untuk menghentikan kasus ini. Pak Made bilang akan diusahakan," jelasnya.

Majelis hakim pimpinan Ah-

mad Peten Silli sempat mengorek lagi keterangan Parwiadi terkait pertemuan ini. Namun Parwiadi mengaku tidak mendengar jelas pembicaraan lainnya. Majelis hakim lalu meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kembali menghadirkan Kadisperindagkop, Ardini untuk diklarifikasi terkait pertemuan di restoran ini. "Jaksa tolong dihadirkan lagi Kadisperindagkop untuk klarifikasi pertemuan ini," ujar majelis hakim.

Selain Parwiadi, JPU juga menghadirkan saksi Gusti Komang Sudiartana yang merupakan staf bapak terdakwa di UD Suka Maju. Dalam keterangannya, Sudiartana mengaku beberapa kali membantu terdakwa meminta rekomendasi pembelian BBM bersubsidi di Disperindagkop Jembrana. Selain itu, ia juga diminta beberapa kali mengurus perizinan UD Sumber Maju milik terdakwa. Sudiartana dan terdakwa sempat beda pendapat soal beberapa tanda tangan dalam pengajuan rekomendasi yang berubah-ubah. Namun Sudiartana mengaku jika tanda tangan tersebut semuanya milik terdakwa. Hal ini sempat dibantah oleh terdakwa yang mengaku tidak pernah tanda tangan pengajuan tersebut. **rez**

Edisi : Kamis, 2 Juli 2015

Hal : 5



Pemprov Bantu 105 Kelompok Tani

DENPASAR, NusaBali

Pemprov Bali mengucurkan bantuan berupa peralatan dan mesin pertanian (absintan) bagi 105 kelompok tani. Hal tersebut terungkap saat Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang diwakili Wagub Ketut Sudikerta melakukan penyerahan bantuan absintan 2015 tersebut secara simbolis di Balai Benih Timpag Kerambitan, Tabanan, Rabu (1/7). Pada kesempatan itu diserahkan sebanyak 255 unit peralatan mesin pertanian yang terdiri dari mesin panen padi, pemipil jagung, pengering gabah, traktor, pompa air, dan mesin penyosohan beras dengan total anggaran senilai Rp 17.836.900.000. Acara

penyerahan bantuan ini kemudian dilanjutkan dengan pembekalan teknis dan penjelasan pendayagunaan peralatan dan mesin pertanian kepada 105 ketua kelompok tani.

Wagub Sudikerta menyampaikan harapannya agar bantuan ini dapat memudahkan para petani dalam pekerjaannya, sehingga bisa mewujudkan sistem pertanian yang modern melalui mekanisasi alat pertanian.

Ditambahkannya, selain peralatan pertanian, peran penyuluh tidak bisa diabaikan dalam memberikan pedampingan bagi para petani. Untuk itu diperlukan sinergitas antara dinas pertanian di kabupaten dengan Dinas Per-

tanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali dalam memberikan pelatihan bagi penyuluhan, bahkan studi banding ke daerah yang lebih berhasil dalam bidang pertanian.

Sudikerta berharap para petani yang mendapat bantuan agar menggunakannya sebaik-baiknya sehingga dapat bermanfaat untuk memberikan hasil panen yang optimal, demikian seperti siaran pers yang diterima *NusaBali*.

Hal senada disampaikan oleh Staf Ahli Kementerian Pertanian Bidang Inovasi dan Teknologi Dr Ir Matsyukur, bahwa untuk peningkatan produksi pangan perlu dilakukan

lima hal yaitu perbaikan irigasi, benih yang berkualitas, pupuk, alat mesin pertanian, dan penyuluhan pendampingan bagi para petani. Sehingga petani akan dapat bekerja optimal. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali Ida Bagus Wisnuardhana mengemukakan, upaya khusus di bidang pertanian dialokasikan bantuan benih, pupuk, bantuan rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani, dan peralatan mesin pertanian di hampir 1.556 subak yang tersebar di seluruh Bali.

Hadir mendampingi Wagub Sudikerta, Kadis Pertanian Kabupaten Tabanan Ir I Nyoman Budiana MM. 

Edisi : Kamis, 2 Juli 2015

Hal : 3



Penurunan Target PAD Bali oleh Dispenda

Komisi II Pertanyakan Revitalisasi Aset

Dispenda dinilai masih terlalu fokus pada pajak kendaraan bermotor. Sedangkan pengelolaan aset Pemprov Bali yang lainnya belum optimal.

DENPASAR, NusaBali

Penurunan target pendapatan asli daerah (PAD) menuai kritikan dari Komisi II DPRD Bali yang membidangi pajak, perekonomian, dan pendapatan daerah. Anggota

Komisi II DPRD Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana mengatakan Dispenda belum responsif dengan potensi daerah.

Adhi Ardhana menjelaskan, pengelolaan aset daerah yang memiliki peluang besar untuk digarap menjadi pendapatan tidak kunjung dilakukan. Selama ini Dispenda masih terlalu fokus dengan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor. Padahal potensi ini sudah harus dialihkan karena ada kejenuhan orang membeli kendaraan. Di samping memang infrastruktur di Bali dan dampak sosial lainnya menjadi ancaman.

"Cobalah pikirkan pengelolaan aset daerah. Di Bali sekarang ini orang butuh lahan parkir, kenapa tidak menyiapkan kawasan parkir dengan memanfaatkan aset Pemprov Bali. Di kawasan Kuta,

Badung, itu lahan Pemprov Bali banyak. *Kan* bisa direvitalisasi untuk parkir di kawasan-kawasan pusat keramaian," ujar politisi asal Puri Gerenceng Denpasar, ini, Rabu (1/7).

Sedangkan terkait dengan pariwisata, lanjut Ngurah Adhi, jajaran Dispenda Provinsi Bali tidak punya rencana aksi. Pemprov Bali tahun 2016 mendatang direncanakan bakal mendapatkan kucuran dana Rp 100 miliar dari peningkatan dana pariwisata sebesar Rp 4 triliun oleh pusat.

"Apa rencana aksinya? *Nggak* ada itu Dispenda membuat rencana aksi bersama dinas terkait mengantisipasi dana ini. Yang difokuskan cuma pos pajak kendaraan, ya *nggak* bisa teruskan. Memang dari sudut ekonomi makro daya beli masyarakat

menurun. Persoalannya bukan itu. Dispenda selama ini juga jarang *ngajak* Komisi II untuk mencari solusi-solusi menggali pendapatan," ucap Ngurah Adhi.

Ngurah Adhi juga menyoroti analisa soal proyek infrasktruktur yang belum jalan, sehingga Dispenda tidak seharusnya menyerah. Proyek infrasktruktur tidak bisa diandalkan. "Bukan orang Bali yang dapat proyeknya. Selama proyek itu dikerjakan pengusaha luar," tegasnya.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Bali I Ketut Suwandhi mengatakan penurunan target pendapatan dari Dispenda harus disikapi dan tetap harus dicarikan solusi. Apa masalahnya, harus ada sebuah kajian mendalam. Suwandhi menyebutkan Komisi II nanti akan melakukan *dengar pendapat* dengan

SKPD terkait untuk membahas persoalan tersebut. "Kita perlu duduk bersama lagi, apa kendala-kendalanya. *Kan* bisa dicarikan solusi, kalau alasannya situasi ekonomi pertumbuhannya tidak sesuai harapan," tutur Suwandhi.

Dikatakannya, alasan-alasan karena pertumbuhan ekonomi sedang turun dan tidak bergerak itu masuk akal. "Daya beli masyarakat memang menurun sekarang. Saya melihat Dispenda melaporkan kepada dewan sebagai sebuah antisipasi dan mekanisme hubungan eksekutif dan legislatif. Tetapi Komisi II punya peran mendorong dan turun mencari solusi supaya target daerah terpenuhi. Nanti kita undang SKPD terkait yang selama ini sebagai penghasil pendapatan," ujar Suwandhi. **nat**

Edisi : Kamis, 2 Juli 2015

Hal : 3



Pimpinan Dewan Dapat Mobil Baru



MOBIL dinas wakil ketua DPRD Badung jenis Toyota Fortuner.

• NUSABALI/ARI SISWANTO

Pimpinan DPRD Badung akan mendapat Toyota Camry dan Fortuner. Alat kelengkapan dewan sedang dipesankan 11 unit Toyota Innova seri G.

MANGUPURA, NusaBali

Mobil dinas pimpinan DPRD Badung makin men-

tereng. Jika sebelumnya setingkat wakil ketua mendapat satu unit sedan mewah Toyota

Camry dan satu unit Nissan X-Trail, maka kini mobil Nissan X-Trail tersebut diganti dengan mobil Toyota Fortuner. Malah ketua dewan sudah mendapatkan terlebih dahulu sebelum wakilnya.

Sekretariat dewan dikabarkan memesan fasilitas mobil baru di APBD Perubahan 2015. Walaupun tak sama persis dengan pimpinan

dewan, tapi mobil jenis Toyota Kijang New Innova seri G yang dipesan 11 unit akan diberikan kepada pimpinan alat kelengkapan dewan mulai dari ketua fraksi, ketua komisi, ketua banleg, dan ketua BK.

Pergantian mobil setingkat pimpinan ini diakui Sekretaris Dewan (Sekwan) Made Wira Dharmajaya, Rabu (1/7). Namun dia tidak menjelaskan alasan perubahan jenis mobil, Wira hanya menyebut Toyota Fortuner digunakan untuk kendaraan operasional.

"Kalau yang Fortuner untuk operasional jabatan, sedang-

kan sedan Camry untuk dinas," jelasnya.

Toyota Camry dan satu unit Nissan X-Trail kini resmi menjadi kendaraan bagi dua wakil dewan Badung yakni Ketut Suiasa dan Made Sunarta.

Terkait dengan pengadaan mobil Innova yang diusulkan konon ditaksir mencapai Rp 3,195 miliar lebih. Menurut Wira Dharmajaya, mobil Innova ini merupakan peremajaan dari mobil Innova sebelumnya, yang menurutnya usianya sudah lebih dari lima tahun. Untuk siapa saja? "Rencananya untuk operasional pimpinan kelengkapan dewan," ujarnya. as

Edisi : Kamis, 2 Juli 2015

Hal : 2



Buntut Rekanan Palsukan Dokumen

Kantor Camat Sukasada Ditender Ulang

Akibatnya hanya tersisa waktu pengerjaan 135 hari bagi rekanan baru, untuk mengerjakan proyek senilai Rp 3 miliar itu.

SINGARAJA, NusaBali

Pembangunan gedung kantor Camat Sukasada, di Kelurahan Sukasada senilai Rp 3 miliar lebih kembali ditender ulang. Hanya saja batas pekerjaan berkurang menjadi 135 hari. Pihak Pemkab pun yakin dan optimis proyek gedung dua lantai itu rampung tepat waktu.

Proyek gedung kantor Camat

Sukasada itu sudah masuk ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemkab Buleleng, sejak Senin (29/6) tiga hari lalu. Saat ini Pokja ULP telah umumkan ke publik untuk mendapat penawaran dari pihak rekanan. "Sudah, sudah masuk, hari Senin sudah masuk berkasnya, dan sekarang kita sudah umumkan," kata Kepala ULP Ida Bagus Gde Surya Bharata saat dikonfirmasi Rabu (1/7).

Disinggung batas waktu pengerjaan? Ida Bagus Surya Bharata menyatakan, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sebagai leading sector dari kegiatan tersebut menyakini kegiatan itu bisa dilaksanakan dengan sisa waktu 135 hari. Pihak pun berharap dalam proses tender nanti tidak ada

kendala. "Mudah-mudahan tidak gagal tender, kalau ini berjalan lancar, dengan waktu itu Dinas PU menyatakan masih bisa dilaksanakan. Karena bekas bangunan kantor Camat itu sudah dibongkar, sekarang tinggal pekerjaannya saja. Tidak lagi membongkar bangunan lama," jelasnya.

Proyek pembangunan gedung kantor Camat Sukasada, sudah sempat ditenderkan. Kala itu pihak rekanan yang dinyatakan menang adalah PT Cahaya Dewata Mandiri. Dalam kontrak kerja, proyek tersebut harus rampung dalam waktu 180 hari. Selaku pemenang tender, pihak rekanan lantas membongkar bangunan bekas kantor camat tersebut, sejak bulan April lalu. Sedangkan

aktivitas perkantoran telah dipindah ke sebelah barat SPBU Sukasada dengan kontrak bangunan tempat tinggal selama delapan bulan.

Pembongkaran bangunan bekas kantor Camat Sukasada hampir seluruhnya rampung. Namun ditengah pembongkaran itu, mendadak pihak rekanan diputus kontrak. Pemutusan kontrak kerja itu akibat ditemukan dokumen penawaran yang diduga dipalsukan oleh pihak rekanan saat tender.

Temuan dokumen yang diduga ada dipalsukan itu berawal dari adanya laporan dari pihak rekanan lainnya. Laporan itu ditujukan kepada pihak Inspektorat Pemkab Buleleng. Pihak Inspektorat lantas telusuri laporan ter-

sebut. Hasilnya, ditemukan keganjilan dalam salah satu berkas dokumen yang disebut-sebut menyangkut masa jaminan dari material yang dipakai dalam proyek pembangunan gedung kantor Camat Sukasada itu. Dari temuan itu, pihak Inspektorat meminta agar kontrak kerja dengan rekanan pemenang tender dihentikan.

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Buleleng, I Nyoman Gede Suryawan, tindakan pemutusan kontrak kerja itu tidak ada kerugian yang ditimbulkan karena pihaknya tidak lakukan pembayaran atas kegiatan yang dilakukan oleh rekanan sebelumnya. "Kita belum membayar, kesalahan itu kan karena pihak rekanan," katanya. **k19**